



Apa yang Menjadi Kesalahan Indonesia tentang Perempuan dan Ekstremisme Berkekerasan

Oleh

Genevieve Curtis

Intern di The Habibie Center

thc@habibiecenter.or.id

Pendahuluan

Sejumlah perkembangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran natur serangan ekstremisme berkekerasan di Indonesia. Dalam konteks tersebut, dimana posisi perempuan dalam konflik ekstremisme berkekerasan di Indonesia? Respons terhadap pertanyaan ini seringkali terlalu sempit dan didasarkan pada stereotip tradisional bahwa perempuan identik dengan perdamaian sedangkan laki-laki identik dengan kekerasan. Kenyataannya, perempuan seringkali hadir di seluruh dimensi konflik, termasuk sebagai pelaku, *mitigator*, ataupun korban.

Pada Desember 2016, Dian Yulia Novi ditangkap karena keterlibatannya dalam rencana penyerangan Istana Merdeka di Jakarta. Ketika Dian divonis tujuh tahun penjara pada September 2017, dia menjadi perempuan pertama di Indonesia yang didakwa dengan menggunakan pasal-pasal terorisme.¹ Pada saat yang bersamaan, seorang perempuan juga ditangkap karena merencanakan serangan di Bali. Pada bulan Mei 2018, untuk pertama kalinya di Indonesia, perempuan terlibat sebagai pelaku serangan bom bunuh diri di Surabaya. Sebuah studi menunjukkan serangan bunuh diri yang dilakukan oleh perempuan rata-rata menimbulkan korban yang lebih banyak dibandingkan yang pelaku serangannya laki-laki. Pengamatan terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh lima kelompok teroris menunjukkan bahwa serangan oleh perempuan menimbulkan rata-rata korban 8,4 orang, sedangkan serangan oleh laki-laki menimbulkan 5,3 orang korban dan lebih mungkin untuk gagal.² Walaupun ideologi jihadis mengharuskan partisipasi aktif seluruh Muslim, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak, ajaran ini sepertinya tidak dipraktikkan secara konsisten. Meskipun demikian, partisipasi perempuan sebagai aktor kekerasan jelas meningkat dan metode-metode yang diterapkan untuk mengatasi ekstremisme berkekerasan juga harus mempertimbangkan kenyataan



ini.

Pengaruh media sosial

Pertumbuhan penggunaan media sosial dan forum-forum daring yang pesat menjadi pintu masuk baru radikalisasi. Format daring memudahkan akses terhadap konten dan komunikasi terenkripsi seperti yang ditawarkan oleh Telegram. Anonimitas dan ketiadaan segregasi gender memungkinkan perempuan untuk lebih aktif terlibat dalam forum-forum daring.³

Aktivitas tenaga kerja migran di forum-forum dan potensi paparan terhadap ideologi radikal perlu menjadi perhatian. Feminisasi tenaga kerja migran telah meningkatkan jumlah perempuan yang tinggal di luar negeri di lingkungan yang relatif terisolasi. Di lingkungan yang demikian, seringkali muncul dorongan untuk mencari koneksi daring. Dalam proses ini, mereka bisa saja rentan terhadap ideologi-ideologi ekstremis. Hal ini patut menjadi perhatian khusus bagi Indonesia yang tenaga kerja migrannya banyak bekerja di negara-negara non-Muslim. Tenaga kerja migran, yang relatif mendapat upah lebih tinggi daripada mereka yang bekerja di dalam negeri, juga bisa menjadi target rekrutmen kelompok ekstremis sebagai sumber pendanaan.⁴ Menurut laporan dari *Institute for Policy Analysis of Conflict*, sudah ada setidaknya 45 tenaga kerja migran Indonesia yang menjadi pendukung aktif *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).⁵ Pada kenyataannya, jumlah tersebut mungkin lebih banyak. Kedua perempuan yang ditangkap pada Desember 2016 adalah mantan tenaga kerja migran.⁶

Asumsi problematik tentang gender

Asumsi stereotipikal tentang gender mendominasi diskusi tentang kenapa dan bagaimana laki dan perempuan teradikalisasi. Persepsi umum menyebutkan bahwa laki-laki termotivasi oleh interpretasi ajaran agama atau rasa nasionalisme, sedangkan perempuan lebih sering termotivasi oleh kejadian-kejadian emosional dan personal.⁷ Terdapat banyak kajian yang melihat faktor-faktor fisik dan emosional sebagai determinan radikalisasi perempuan.⁸ Akan tetapi, peran faktor-faktor tersebut dalam radikalisasi laki-laki cenderung terabaikan. Perempuan tidak hanya diasumsikan kecil kemungkinannya untuk memiliki motif-motif politik, tapi juga dianggap tidak memiliki otonomi dalam proses radikalisasi. Asumsinya, ketika seorang perempuan teradikalisasi, hal itu terjadi lebih karena peran laki-laki dan bukan karena agensi dan kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan-keputusan secara independen berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politis dan





religius. Namun, kenyataannya tidak demikian. Pada kasus Abu Hamzah, seorang pimpinan kelompok teror yang terafiliasi dengan ISIS, disebutkan bahwa istrinya, Solimah, justru memiliki kesetiaan yang lebih dalam terhadap ISIS.⁹

Dalam jejaring teror, perempuan juga seringkali memainkan peran-peran pendukung seperti memberikan perlindungan pada tersangka teroris yang sedang dicari aparat, rekrutmen dan penyebaran materi propaganda, dan juga menikahi para jihadis dan melahirkan serta mendidik anak-anaknya menjadi militan.¹⁰ Di Indonesia, kelompok arisan dan bentuk penggalangan dana lain biasanya didominasi oleh perempuan.¹¹ Dalam perkembangan terakhir menunjukkan bahwa ada pergeseran peran perempuan di luar peran-peran tradisional ini.

Peran strategis perempuan dalam kelompok ekstremis

Berbeda dengan laki-laki, ada disparitas antara apa yang memotivasi perempuan untuk bergabung dengan kelompok teror dengan apa yang mendorong kelompok teror untuk merekrut perempuan.¹² Ketika perempuan bergabung dengan alasan yang sama dengan laki-laki, perempuan biasanya akan dianggap lebih bernilai. Kelompok ekstremis rupanya memahami asumsi-asumsi gender ini dan secara strategis menggunakannya untuk kepentingan taktis mereka. Sebagai contoh, *Al Qaeda in Iraq* (AQI), memahami stereotip tentang perempuan sebagai aktor yang pasif, menggunakan perempuan karena pertimbangan bahwa perempuan kecil kemungkinannya untuk dicurigai oleh aparat keamanan ketika melakukan aksi. Selain itu, serangan yang dilakukan oleh perempuan juga cenderung memicu atensi media massa yang lebih besar dan bahkan bisa memicu rasa malu di kalangan anggota kelompok laki-laki sehingga, harapannya, mereka ikut terdorong untuk melakukan aksi.¹³ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai ketidakseimbangan gender di dalam aparat keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku teror perempuan dalam menjalankan aksinya. Mengetahui dirinya kecil kemungkinannya akan diperiksa oleh personil keamanan laki-laki, para pelaku teror perempuan bisa menyembunyikan alat peledak di dalam bajunya.¹⁴ Oleh karena itu, menambah jumlah personil keamanan perempuan dapat menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok teror.

Jika serangan teror oleh pelaku perempuan berhasil, biasanya efek kejutnya akan lebih besar dan mengundang perhatian media yang lebih luas.¹⁵ Hal ini menjadi motivasi lain bagi kelompok-kelompok teror untuk menggunakan perempuan dalam aksinya. Rata-rata serangan teror yang dilakukan oleh perempuan mendapat perhatian media delapan kali lebih besar dari yang dilakukan





oleh laki-laki.¹⁶ Kecenderungan untuk melabeli pelaku aksi teror perempuan sebagai “teroris perempuan” sedangkan laki-laki ‘sekedar’ sebagai “teroris” juga mengindikasikan adanya disparitas dalam melihat aksi teror dan hubungannya dengan gender. Fakta bahwa kemampuan perempuan untuk menjadi seorang kombatan dilihat sebagai suatu hal yang memalukan bagi laki-laki juga menunjukkan bahwa kelompok teror pada umumnya, meskipun menerima keterlibatan perempuan, tidak serta merta melihat perempuan setara dengan laki-laki.

Analisis

Terdapat kekurangan dalam hal pemahaman terhadap hubungan antara perempuan dengan ekstremisme berkekerasan dalam kerangka kebijakan yang ada sekarang. *Women, Peace and Security Agenda* yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya berfokus pada penanganan persoalan perempuan sebagai korban kekerasan seksual dan pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan dalam proses bina damai. Akan tetapi, dalam agenda tersebut tidak melihat bagaimana perempuan terlibat atau terdampak oleh konflik ekstremisme dengan cara-cara yang lain. Dengan membatasi kemungkinan peran perempuan sebagai korban, prevalensi perempuan pada peran-peran yang lain akan terus terabaikan.

Resolusi DK-PBB 2242 mendorong dilakukannya penelitian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong radikalisme di kalangan perempuan.¹⁷ Hal ini mungkin mengindikasikan pergeseran fokus di masa yang akan datang. Strategi kontra ekstremisme berkekerasan yang efektif mensyaratkan untuk meninggalkan cara pandang biner bahwa perempuan, ketika terlibat dalam aksi teror, adalah karena tercuci otaknya atau sekedar bertindak sebagai provokator.¹⁸ Dibutuhkan sebuah pemahaman yang melihat pengalaman perempuan sama pentingnya dengan laki-laki. Sejak dikeluarkannya Resolusi DK-PBB 1325 tahun 2000, pemahaman yang berkembang adalah bahwa jika dilibatkan secara aktif, perempuan dapat berkontribusi terhadap upaya mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Meskipun benar, pemahaman ini tidak mencakup semua hal yang perempuan bisa lakukan. Sekarang adalah waktunya untuk memperluas pemahaman terhadap potensi perempuan baik sebagai agen perdamaian maupun agen perusak (*destruction*). Perempuan memiliki kapasitas untuk melakukan aksi teror yang bertentangan dengan gagasan ideal tentang perempuan dan feminitas saat ini. Kerangka kebijakan untuk melawan ekstremisme berkekerasan harus beradaptasi dengan perubahan natur peran perempuan.





Endnotes

- 1 Hawley, Samantha. "Indonesian Woman Jailed for 7 Years over Suicide Bomb Plot." ABC News, 28 Aug. 2017, www.abc.net.au/news/2017-08-28/indonesian-woman-jailed-for-suicide-bomb-plot-at-jakarta-palace/8849706.
- 2 O'rou, Lindsey A. "What's special about female suicide terrorism?." *Security Studies* 18, no. 4 (2009): 681-718.
- 3 Nasir, Amalina Abdul. "Women in Terrorism." *Counter Terrorist Trends and Analyses* 11, no. 2 (2019).
- 4 Sheany. "Indonesian Women Migrant Workers Are Becoming Increasingly Radicalized Through Social Media." *Jakarta Globe*, 19 Dec. 2017, jakartaglobe.id/news/indonesian-women-migrant-workers-becoming-increasingly-radicalized-social-media/.
- 5 Nuraniyah, Nava. "Migrant Maids and Nannies for Jihad." *The New York Times*, The New York Times, 18 July 2017, www.nytimes.com/2017/07/18/opinion/isis-jihad-indonesia-migrant-workers.html.
- 6 Nuraniyah, Nava. "Migrant Maids and Nannies for Jihad." *The New York Times*, The New York Times, 18 July 2017, www.nytimes.com/2017/07/18/opinion/isis-jihad-indonesia-migrant-workers.html.
- 7 Nuraniyah, Nava. "Not just brainwashed: understanding the radicalization of Indonesian female supporters of the Islamic State." *Terrorism and political violence* 30, no. 6 (2018): 890-910.
- 8 Mahmood, Sara. "Negating Stereotypes: Women, Gender, and Terrorism in Indonesia and Pakistan." (2019): 11.
- 9 Santos, Ana P. "In Indonesia, 'Women Are Now a Permanent Part of the Jihadi Structure.'" *Pulitzer Center*, 1 Nov. 2019, pulitzercenter.org/reporting/indonesia-women-are-now-permanent-part-jihadi-structure.
- 10 Santos, Ana P. "In Indonesia, 'Women Are Now a Permanent Part of the Jihadi Structure.'" *Pulitzer Center*, 1 Nov. 2019, pulitzercenter.org/reporting/indonesia-women-are-now-permanent-part-jihadi-structure.
- 11 http://openasia.org/en/g/wp-content/uploads/2018/07/The_Role_of_Women_in_Violent_Extremism_in_Asia-1.pdf
- 12 Mahmood, Sara. "Negating Stereotypes: Women, Gender, and Terrorism in Indonesia and Pakistan." (2019): 11.
- 13 Nuraniyah, Nava. "Not just brainwashed: understanding the radicalization of Indonesian female supporters of the Islamic State." *Terrorism and political violence* 30, no. 6 (2018): 890-910.
- 14 Bigio, Jammie, and Rachel Vogelstein. *Women and Terrorism: Hidden Threats, Forgotten Partners*. Council on Foreign Relations, 2019.
- 15 Mahmood, Sara. "Negating Stereotypes: Women, Gender, and Terrorism in Indonesia and Pakistan." (2019): 11.
- 16 Bloom, Mia. *Bombshell: women and terrorism*. University of Pennsylvania Press, 2012.
- 17 UNSC (2015) SC Res 2242 UN SCOR 7533rd mtg, UN Doc S/RES/2242 (13 October) (R2242)
- 18 Nuraniyah, Nava. "Not just brainwashed: understanding the radicalization of Indonesian female supporters of the Islamic State." *Terrorism and political violence* 30, no. 6 (2018): 890-910. See: <https://corona.jakarta.go.id/id/data>





THC INSIGHTS

THC Insights are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by researchers at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

The Habibie Center was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

Contact:

The Habibie Center
Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560
Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212
Email: thc@habibiecenter.or.id
Website: www.habibiecenter.or.id